Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan ISSN 2715-467X
Vol 3, 22 Desember 2021, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
Hal 31-41

Kecerdasaan kewarganegaraan terhadap perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk gambar

Nur Wahyu Rochmadi [1], Laras Ati Rochastuti [2]

[a] FIS, Universitas Negeri Malang, Malang
[b] FIB, Universitas Brawijaya, Malang

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel
Diterima: 20/12/2021
Disetujui: 31/12/2021

Kata kunci
kecerdasan kewargaan; nilai; Pancasila; gambar

Keywords
civic intelligence, values, Pancasila, picture.

ABSTRAK

Setiap manusia tidak bisa hidup tanpa negara, sebaliknya kualitas negara sangat tergantung kepada manusianya (warga negara). Kecerdasan, karakter, dan partisipasi warga negara (*civic intelligence quotient*) berpengaruh terhadap eksistensi dan keberhasilan negara dalam mewujudkan tujuannya. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia harus memiliki pemahaman yang benar tentang makna dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kecerdasan warga negara (*civic intelligence quotient*), mahasiswa, terhadap perwujudan nilai-nilai Pancasila berupa perilaku di kehidupan sehari-hari. Penelitian dilaksanakan berdasarkan desain kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah mahasiswa penempuh matakuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Negeri Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi dalam bentuk mendokumentasikan hasil observasi berupa foto atau gambar tentang perilaku manusia di sekitar tempat tinggal mahasiswa yang dikategorikan sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif. Temuan penelitian menjelaskan bahwa kecerdasan warga negara (*civic intelligence quotient*), mahasiswa, dalam mengidentifikasi perwujudan Pancasila dalam bentuk perilaku manusia di kehidupan sehari-hari masih ada kesalahan dan kekeliruan. Berdasarkan temuan tersebut, perlunya dilakukan refleksi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, baik substansi maupun pembelajarannya.

ABSTRACT

Human being can't live without the state, on the contrary the quality of the state is very dependent on the human (citizens). Intelligence, character, and citizen participation (civic intelligence quotient) affect the existence and realized goals of the state. Pancasila is the basics of the state and the way of life of the Indonesian people, therefore every Indonesian citizen must have a correct understanding of its meaning and manifestation in these life. The research was conducted with the aim of identifying the civic intelligence quotient, students, towards the realization of Pancasila values in the form of behavior in everyday life. The research was conducted based on a descriptive qualitative design. The research subjects were students who took the Pancasila Education course at the State University of Malang. Data collection is done by observation and documentation in the form of documenting the results of observations in the form of photos or pictures about human behavior around student residences which are categorized as a form of Pancasila values. The data were analyzed using an interactive model. The research findings explain that the civic intelligence quotient, students, in identifying the explorement of Pancasila values in the form of human behavior in everyday life are still mistakes and errors. Based on these findings, it is necessary to reflect on the improvement and enhancement of the quality of Pancasila education in universities, both in substance and learning strategies.

Pendahuluan

Warga negara merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari negara. Eksistensi suatu negara sangat tergantung kepada kapabilitas, kualitas dan kuantitas warga negaranya. Pada saat ini memang telah terjadi pergeseraan, dimana sebelumnya unsur wilayah sangat menentukan eksistensi suatu negara, tetapi sekarang ini, unsur warga negara yang paling menentukan eksistensi suatu negara dalam kehidupan dunia di era global. Pengetahuan, keterampilan, karakter serta partisipasi warga negara sangat menentukan keberadaan/ketiadaan suatu negara serta keterlibatannya dalam kehidupan di dunia.

Korespondensi: Nur Wahyu Rochmadi, nur.wahyu.fis@um.ac.id, PPKn, FIS UM, Malang

Manusia tidak bisa melepaskan diri dari suatu negara, bahkan manusia harus mampu memelihara eksistensinya dalam lintas waktu dan generasi dengan mempertahankan nilai-nilai dasar komunitas negara sebagai acuan dalam berpikir, bertindak, berperilaku dan melakukan sesuatu. Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan Bahmueller (1997) yang mengidentifikasi adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara yaitu*"…the degree of economic development; …a sense of national identity; …historical experience and elements of civic culture".*

Kedudukan warga negara dalam perspektif ke depan berada dalam posisi sangat strategis dan menentukan untuk mewujudkan kemakmuran negara dibandingkan kekayaan sumber daya alamnya. Kualitas warga negara merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan kuantitasnya dalam hal ini. Oleh karena itu, pengembangan aktivitas peningkatan kualitas warga negara menjadi sangat penting, sebagai upaya untuk pengembangan sumberdaya manusia, warga negara, mewujudkan tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kriteria warga negara yang berkualitas, sebagaimana dikemukakan dalam *21st Century Partnership Learning Framework*, bahwa warga negara yang berkualitas memiliki kompetensi dan/atau keahlian sebagai berikut: 1) kemampaun berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*), mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah; 2) kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak; 3) kemampuan mencipta dan membaharui (*Creativity and Innovation Skills*), mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif; 4) literasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*), mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari; 5) kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*), mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi; dan 6) kemampuan informasi dan literasi media (*Information and Media Literacy Skills*), mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak (BSNP, 2010, hal. 44-45).

Sedangkan Banks (1990, hal. 5) menambahkan bahwa selain keahlian dan karakter tersebut, warga negara yang berkualitas harus mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial nyata yang berada di hadapan mereka, terutama terkait dengan: (1) g*lobal awareness,* kemampuan dalam melihat tren dan tanda-tanda jaman terutama dalam kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi; 2) *financial, economic, business and entrepreneurial literacy,* keahlian dalam mengelola berbagai sumber daya untuk meningkatkan kemandirian berusaha; 3) *civic literacy,* kemampuan dalam menjalankan peran sebagai warga negara dalam situasi dan konteks yang beragam; dan 4) e*nvironmental awareness,* kemauan dan keperdulian untuk menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar.

Wacana tentang karakteristik warga negara Indonesia yang berkualitas, agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan dunia, dikemukakan oleh BSNP (2010, hal. 28-30) adalah warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan unggul, mampu berperan sebagai penyalur dan pengembang karakter luhur, serta memiliki rasa kebangsaan.

Media yang dianggap paling tepat dalam mewujudkan warga negara dengan karakteristik tersebut adalah pendidikan. Freud (BSNP, 2010) menyebut, pendidikan adalah kerja membangun manusia supaya bisa *survive* melindungi diri terhadap alam serta mengatur hubungan antar-manusia. Melalui pendidikan terjadi proses di mana suatu kompleks pengetahuan, kecakapan (*capacities*), sikap, serta nilai diteruskan kepada generasi selanjutnya.

Pendidikan tidak hanya ditujukan agar manusia bisa *survive* melindungi diri terhadap alam, tetapi juga juga menjadikan manusia mampu melindungi diri terhadap makluk hidup lainnya, termasuk dari manusia yang lain. Bahkan pendidikan diharapkan menjadikan manusia mampu memperdayakan alam dan makluk hidup yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan

kesejahteraan hidupnya. Pendidikan ditujukan untuk menjadikan manusia *survive*, menjadikan manusia memiliki kemudahan dalam hidup, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah dan cepat, mampu mengatasi berbagai permasalahan hidupnya, serta mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai tujuan diantaranya untuk membentuk warga negara Indonesia yang baik. Warga negara Indonesia yang baik ditandai oleh kepemilikan pengetahuan kewarganegaraan (*civic intelligence*). Kewarganegaraan partisipasitif *(civic participation),* serta tanggungjawab kewarganegaraan *(civic responsibility)* sebagai warga negara Indonesia dalam konteks peradaban kekinian bangsa Indonesia berdasar nilai-nilai Pancasila.

PPKn merupakan mata pelajaran yang memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan sesama; memahami dan menerapkan pengetahuan factual, konseptual, procedural dan metakognitif tentang kewarganegaraan dengan terampil (Silabus PPKn SMA, 2016).

Mata pelajaran PPKn merupakan suatu *integrated knowledge system* (Winataputra, 2001, 2005) yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki *civic intelligence* dan *civic participation* serta *civic responsibility* sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang berdasar nilai-nilai Pancasila (Winataputra, 2001, 2005, 2006). Berdasarkan visi dan misi PPKn, materi pokoknya meliputi pengetahuan, keterampilan dan disposisi kepribadian warga negara Indonesia kekinian yang fungsional.

Komponen penting dari materi PPKn adalah sikap dan keterampilan warga negara (Winataputra, 2006). Agar warga negara Indonesia dapat menjalankan hak dan menunaikan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, mereka bukan hanya harus memiliki pengetahuan berkenaan dengan kewarganegaraan, tetapi juga harus memiliki sikap dan keterampilan yang relevan dalam berwarganegara Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengetahuan berkenaan dengan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia yang baik antara lain pemahaman tentang dasar negara dan sejarah negara Indonesia, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, ketentuan dan perwujudannya, serta pelaksanaanya. Selain itu juga kemampuan dan keterampilan berpikir kritis yang meliputi keterampilan mendeskripsikan dan mengidentifikasi, keterampilan menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempetahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan public serta keterampilan dalam berinteraksi dan mempengaruhi (Winataputra, 2006, hal. 12-13).

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic intelligence quotient*) memiliki kedudukan penting, karena menjadi dasar dari implementasi *civic participation* dan *civic responsibility* warga negara dalam kehidupan bernegara. Permasalahannya, bilamana ditinjau dari berbagai fenomena yang ada di masyarakat, misalnya perkelahian antara pelajar, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, penyelewengan seksual, pembunuhan, korupsi, mudahnya melakukan pelanggaran UU ITE, dan sebagainya mengindikasikan rendahnya pengetahuan kewarganegaraan.

Bertolak dari hal tersebut dilakukan penelitan dengan fokusnya pada kecerdasan kewarganegaraan, terhadap perwujudan nilai-nilai Pancasila yang berupa perilaku di kehidupan sehari-hari. Dengan harapan bisa menjadi rujukan dalam pengembangan *civic intelligence* dan *civic participation* serta *civic responsibility* warga negara Indonesia kekinian dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang berdasar nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu membentuk warga negara Indonesia yang baik serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan dunia.

Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif, dengan alasan untuk mengidentifikasi kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence quotient*), terhadap perwujudan nilai-nilai Pancasila berupa perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa penempuh matakuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Negeri Malang pada semester gasal 2021/2022.

Penelitian ini dilaksanakan dengan skenario, subjek penelitian (mahasiswa) melakukan observasi terhadap perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitarnya, yang menurut mahasiswa diidentifikasi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, kemudian didokumentasikan dalam bentuk gambar atau foto.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi dalam bentuk mendokumentasikan hasil observasi berupa foto atau gambar tentang perilaku manusia di sekitar tempat tinggal mahasiswa yang dikategorikan sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Perwujudan nilai-nilai Pancasila berupa perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dipaparkan dalam bentuk gambar. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai; keimanan, ketaqwaan, syukur dan toleransi. Perwujudannya dalam bentuk gambar menurut subjek penelitian sebagai berikut:

(a) *(b)*

(c) *(d)*

Gambar 1 Perilaku yang sesuai nilai sila Ketuhanan yang Maha Esa

Gambar di atas menjelaskan tentang berbagai perilaku manusia sehari-hari dalam kegiatan yang menurut subjek penelitian sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Gambar (a) merupakan gambar yang menjelaskan manusia akan melaksanakan ibadah sholat berjamaah, gambar (b) manusia yang sedang melaksanakan kegiatan tasyakuran, berikutnya gambar (c) manusia sedang beribadah di sebuah gereja dan gambar ke 4 menjelaskan kegiatan manusia sedang membaca kitab suci Al Qur'an. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa perwujudan nilai-nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diidentifikasi subjek penelitian adalah keimanan, ketaqwaan, dan syukur, sedangkan nilai toleransi tidak ada.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai; kemanusiaan, manusiawi, keadaban, kesamaan, penghormatan, kepedulian, kasih sayang, dan keadilan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bentuk perilaku manusia pada kehidupan sehari-hari menurut subjek penelitian sebagai berikut:

(a) *(b)* *(c)* *(d)*

Gambar 2 Perilaku yang sesuai nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Gambar di atas menjelaskan tentang berbagai perilaku manusia sehari-hari dalam kegiatan yang menurut subjek penelitian sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar (a) merupakan gambar yang menjelaskan perwujudan dari nilai kasih sayang, gambar (b) menjelaskan perwujudan dari nilai persamaan di bidang pendidikan, berikutnya gambar (c) menjelaskan perwujudan dari nilai persamaan, semuanya memperoleh berkat yang sama baik isi maupun bungkusnya, dan gambar (d) menjelaskan kegiatan manusia yang sedang memperoleh bantuan paket pulsa internet, sebagai bentuk perwujudan nilai kepedulian. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa perwujudan nilai-nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang diidentifikasi subjek penelitian dalam bentuk gambar adalah kasih saying, kesamaan, persamaan derajat, kepeduliaan, dan keadilan.

Sila persatuan Indonesia mengandung nilai; persatuan, kesatuan, kebersamaan, keamanan, kerukunan, dan cinta tanah air. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sila persatuan Indonesia dalam bentuk perilaku manusia pada kehidupan sehari-hari menurut subjek penelitian sebagai berikut:

(a) *(b)* *(c)* *(d)*

Gambar 3 Perilaku yang sesuai nilai sila Persatuan Indonesia

Gambar di atas menjelaskan tentang berbagai perilaku manusia sehari-hari dalam kegiatan yang menurut subjek penelitian sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Gambar (a) merupakan gambar yang menjelaskan manusia sedang melakukan kerja bakti, perwujudan dari nilai kebersamaan, gambar (b) menjelaskan tentang perilaku manusia sebagai perwujudan dari nilai cinta tanah air, sedangkan gambar (c) menjelaskan tentang perilaku manusia sedang kenduri, berdoa bersama, perwujudan dari nilai persatuan dan kesatuan, berikutnya gambar (d) menjelaskan kegiatan manusia yang sedang melakukan kerjabakti membersihkan lingkungan, sebagai bentuk perwujudan nilai kepedulian dan cinta tanah air.

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa perwujudan nilai-nilai dalam sila sila persatuan Indonesia yang diidentifikasi subjek penelitian dalam bentuk gambar adalah kebersamaan, persatuan, kesatuan, cinta tanah air dan kepedulian.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung nilai; kerakyatan, kebijaksanaan, musyawarah, kekeluargaan, demokrasi, dan kedaulatan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam bentuk perilaku manusia pada kehidupan sehari-hari menurut subjek penelitian sebagai berikut:

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4 Perilaku yang sesuai nilai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Gambar di atas menjelaskan tentang berbagai perilaku manusia sehari-hari dalam kegiatan yang menurut subjek penelitian sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Gambar (a) merupakan gambar yang menjelaskan manusia sedang melakukan musyawarah, perwujudan dari nilai kerakyatan dan musyawarah, gambar (b) menjelaskan tentang perilaku manusia sedang rapat, sebagai perwujudan dari nilai kerakyatan, kekeluargaan, demokrasi dan musyawarah, sedangkan gambar (c) menjelaskan tentang perilaku manusia sedang dalam suatu pertemuan, perwujudan dari nilai demokrasi dan musyawarah, berikutnya gambar (d) menjelaskan kegiatan manusia yang sedang melakukan foto bersama, sebagai bentuk perwujudan nilai kekeluargaan. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa perwujudan nilai-nilai dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang diidentifikasi subjek penelitian dalam bentuk gambar adalah kerakyatan, musyawarah, kekeluargaan, dan demokrasi. Ada kekeliruan dalam mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, karena perwujudan nilai-nilai pada sila keempat ini tidak bisa dalam bentuk gambar, tetapi dalam bentuk video atau dokumen yang berupa teks.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai; keadilan sosial, kesejahteraan, kemakmuran, dan gotong royong. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk perilaku manusia pada kehidupan sehari-hari menurut subjek penelitian tergambar pada Gambar 5. Gambar tersebut menjelaskan berbagai perilaku manusia sehari-hari dalam kegiatan yang menurut subjek penelitian sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambar (a) merupakan gambar yang menjelaskan manusia sedang melakukan kegiatan penyerahan bantuan, perwujudan dari nilai keadilan sosial dan kesejahteraan, gambar (b) menjelaskan tentang sawah, sebagai perwujudan dari nilai kemakmuran dan kesejahteraan, sedangkan gambar (c) menjelaskan tentang perilaku manusia sedang melakukan kerjabakti membangun rumah, perwujudan dari nilai gotong royong, berikutnya gambar (d) menjelaskan kegiatan manusia yang sedang bekerja bersama-sama membersihkan bawang, sebagai bentuk perwujudan nilai gotong royong.

(a) *(b)*

(c) *(d)*

Gambar 5 Perilaku yang sesuai nilai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa perwujudan nilai-nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diidentifikasi subjek penelitian dalam bentuk gambar adalah keadilan sosial, kesejahteraan, kemakmuran, dan gotong royong. Namun, ada kekeliruan dalam mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran. Karena perilaku atau kegiatan manusia yang diidentifikasi sebagai perwujudan dari nilai-nilai tersebut tidak sesuai, dan nilai-nilai tersebut perwujudannya harus lebih banyak tidak hanya perilaku tetapi juga fasilitas hidup yang dimilikinya.

Konsep nilai dalam hal ini dimaknai sebagai sesuatu yang berguna, baik, benar, indah, yang dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat dalam suatu komunitas (negara). Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak, namun hal tersebut menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan dan hal-hal lain yang bersifat batiniah. Nilai adalah suatu kualitas, bukan kuantitas. Nilai adalah sesuatu yang bersifat ideal, bukan faktual. Nilai berkaitan dengan *das sollen* (apa yang seharusnya), bukan *das sein* (apa yang senyatanya). Nilai merupakan bagian dari hidup manusia, oleh karena itu hubungan antar manusia selalu diikat oleh nilai, demikian halnya perilaku manusia.

Nilai-nilai dalam suatu komunitas masyarakat bersumber pada; agama, budaya, negara, dan tokoh. Agama dan budaya merupakan sumber nilai yang paling banyak dan lengkap, yang ruang lingkupnya meliputi nilai dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dalam hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Negara, membuat kebijakan dengan menetapkan nilai-nilai tertentu yang menjadi dasar negaranya. Negara Indonesia, menetapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia, disebut Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila sebagai berikut (Rochmadi, 2010).

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan, hal ini berdasarkan dari adanya kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk (ciptaan) Tuhan. Kesadaran manusia sebagai ciptaan Tuhan melahirkan kesadaran bahwa manusia adalah hamba Tuhan. Posisi sebagai "hamba" berarti mengandung konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Dengan adanya kesadaran manusia sebagai ciptaan dan hamba Tuhan, maka nilai inti pada sila pertama adalah nilai *keimanan dan ketaqwaan.* Taqwa berarti menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengandung nilai *toleransi.* Hal ini dilatarbelakangi oleh karakteristik bangsa Indonesia yang dibangun dengan solidaritas sosial yang besar melampaui batas-batas agama, suku, golongan, etnis dan lainnya. Setiap warga masyarakat Indonesia memiliki sikap toleran (mau memahami, menghargai, dan mengerti) setiap pemeluk agama dalam

menjalankan keyakinan masing-masing. Sikap dan perilaku untuk saling mengasihi dan menyayangi, memahami, menghargai, mengerti, menghormati, bekerjasama, mengembangkan suatu kehidupan yang damai, dan tidak saling merugikan adalah wujud dari nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan. Kemanusiawian, keadilan, dan keberadaban manusia tidak terlepas dari harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berakal. Berakalnya manusia itu berkaitan dengan daya pikir dan daya keteringatannya kepada Tuhan.

Keteringatan kepada Tuhan itu bisa terjadi kalau manusia mata hatinya tidak buta, sebab hanya hati nuranilah yang bisa menerima ajaran-ajaran Tuhan. Keberadaban dan keadilan manusia bisa terwujud jika ada pertemuan dan perpaduan antara kekuatan berpikir yang ada pada otak manusia dan kekuatan mengingat Tuhan yang ada pada hati nurani manusia.

Secara kodrati, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dikaruniai akal. Dengan kemampaun akalnya, manusia dapat memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari cahaya Tuhan (perpaduan kekuatan pikir dan keteringatannya kepada tuhan). Dengan pengetahuan itu, lahirlah apa yang disebut sebagi kebudayaan dan peradaban manusia sehingga manusia juga dikenal sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab.

Tuhan memandang semua manusia ciptaannya sama, yang membedakan manusia yang satu dengan lainnya adalah ketaqwaannya, sedangkan yang mengetahui kadar ketaqwaan manusia kepada Tuhan juga hanya Tuhan sendiri. Setiap manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia yang mempunyai persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan.

3. Persatuan Indonesia

Sila persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan. Nilai persatuan dalam sila ketiga ini bermakna persatuan dan kesatuan dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Artinya kebersatuan sebagai satu bangsa menjadi acuan utama dalam bersikap dan berperilaku dalam bidang apapun.

Persatuan Indonesia berasal dari kesadaran bahwa bangsa Indonesia dibangun berdasarkan solidaritas sosial yang besar dari lintas agama, suku, ras, golongan, dan lain-lain. Karena persatuan dan kesatuan bangsa ini dibangun berdasarkan solidarilas sosial, maka untuk mencapai persatuan dan kesatuan itu, diperlukan adanya *kerelaan berkorban,* yakni merelakan untuk sedikit mengorbankan kepentingan diri sendiri atau golongan demi kepentingan yang lebih besar sebagai bangsa.

Sikap dan perilaku untuk mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan menjadi ciri pribadi manusia Indonesia. Setiap manusia Indonesia memerlukan suatu kehidupan dan bercita-cita untuk dapat hidup makmur, sejahtera, aman, tenteram, rukun, damai, bahagia dunia akhirat.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai inti dari sila keempat adalah kerakyatan. Kepentingan rakyat menjadi fokus sentral dalam sila keempat. Namun, meskipun rakyat banyak menjadi fokus utama, tidak berarti apapun yang disuarakan sebagian besar rakyat itulah yang benar, oleh karena itu *musyawarah* untuk mencapai *mufakat* dikedepankan, dan bukan mufakat dulu baru musyawarah.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" dalam sila keempat tersebut dimaknai juga sebagai "musyawarah yang dilakukan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan yang dituntun oleh nilai-nilai agama", sebab kata *"hikmat"* merujuk kepada ketuhanan. Jadi, musyawarah yang dilakukan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan yang disinari oleh ajaran-ajaran Tuhan ditujukan untuk mengabdi atau untuk melayani kepentingan rakyat banyak. Dengan

demikian, sila keempat ini juga mengandung nilai *ketuhanan* dan *pelayanan* kepada kepentingan rakyat.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan bermakna bahwa manusia Indonesia menghargai dan mendukung setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah, yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat.

Penghargaan terhadap hasil musyawarah terjadi jika prosesnya benar-benar dilakukan secara demokratis, bijaksana, dan disinari oleh cahaya Ketuhanan. Sebaliknya, meskipun keputusan tersebut hasil musyawarah berdasar suara rakyat banyak, namun jika proses-proses musyawarah atau pemungutan suara dilakukan dengan penuh rekayasa dan kepura-puraan tanpa cahaya Ketuhanan, maka tidak patut disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pada sila keempat ini juga terdapat demokrasi. Demokrasi yang mengedepankan musyawarah, "demokrasi" dipersepsi sebagai paham kedaulatan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Demokrasi dan musyawarah yang mengandung prinsip *keselarasan* dan *keseimbangan* antar berbagai kepentingan rakyat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai inti dari sila kelima ini adalah keadilan, keadilan sosial. Keadilan sosial dalam hal ini bermakna bukan hanya semua rakyat "mendapatkan" yang sama, tetapi juga mengutamakan yang "miskin atau tidak mampu" untuk mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan yang mampu. Inilah karakteristik khas yang menjadi ciri bangsa Indonesia tentang makna keadilan.

Keadilan sosial berarti kedaulatan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia di segala bidang baik material maupun spiritual. Keadilan sosial yang dimasukkan dalam Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini memberi jaminan bahwa setiap rakyat Indonesia diperlakukan secara adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Darmodihardjo, 1994).

Keadilan akan terwujud jika ada kesedian untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya secara adil. Oleh karena itu, keadilan sosial akan terwujud jika ada penghargaan kepada kewajiban dan hak oleh manusia.

Nilai-nilai dalam kehidupan manusia dalam masyarakat selalu mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan manusia dalam masyarakat (komunitas). Misalnya di era milineal sekarang ini, nilai kreatifitas, inisiatif, produktif, cepat, kritis, publish, multitasking, *sharing is cool*, *connected, confidence*, efektif dan efisiensi lebih diunggulkan dibandingkan dengan yang lainnya.

Hasil penelitian di atas bilamana ditinjau dari paparan teoritik menunjukkan bahwa kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence quotient*) mahasiswa dalam mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila yang berupa perilaku sehari-hari dalam bentuk gambar sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Hanya saja, tidak semua perwujudan nilai-nilai tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk gambar, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk video.

Fakta ini menandakan bahwa kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence quotient*) mahasiswa masih perlu ditingkatkan, karena berpengaruh terhadap implementasi dan perwujudan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam bentuk perilaku mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa tidak akan mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bila kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence quotient*) masih rendah.

Kesimpulan

Kehidupan komunitas manusia dalam suatu negara tidak bisa melepaskan diri nilai. Oleh karena itu, manusia harus mampu memelihara, mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai dasar komunitas sebagai acuan dalam berpikir, bertindak, berperilaku dan melakukan/tidak melakukan sesuatu.

Nilai-nilai dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu setiap manusia Indonesia harus memiliki kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence quotient*) yang tinggi terhadap nilai-nilai Pancasila beserta perwujudannya, agar eksistensi negara bisa terwujud dan tujuan negara tercapai. Setiap komunitas harus menjaga eksistensi nilai yang menjadi dasar dari berdirinya komunitas tersebut, serta melestarikannya melalui transformasi nilai (pendidikan). Sebagai sebuah proses, transformasi berlangsung secara terencana dan sistematis, tetapi ada juga yang berlangsung tanpa perencanaan dan tanpa dilandasi adanya kesadaran, karena sudah menjadi kebiasaan. Transformasi nilai juga tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan manusia dalam masyarakat (komunitas). Misalnya di era milineal sekarang ini, nilai kreatifitas, inisiatif, produktif, cepat, kritis, publish, multitasking, sharing, connected, confidence, efektif dan efisiensi lebih diunggulkan dibandingkan dengan yang lainnya. Namun demikian, tidak boleh menggerus nilai-nilai dasar dari komunitas negara tersebut.

Daftar Pustaka

Asia Pacific Civic Educators Consortium (APCEC). (2000). *Teacher Education for Democratic Citizenship*, Penang.

Bahmueller, C. F. (1997). A framework for teaching democratic citizenship: An international project. *International Journal of Social Education*, *12*, 101-112.

Banks, J. A. (1990). Citizenship education for a pluralistic democratic society. *The social studies*, *81*(5), 210-214.

BSNP. (2010). *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI.* Badan Standar Nasional Pendidikan. Jakarta. Depdiknas.

Rochmadi, N. W. (2010). *Praktek Belajar Kewarganegaraan: Penilaian Hasil Belajar Berbasis Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila.* Malang. Lapasila Universitas Negeri Malang.

Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi: Suatu kajian konseptual dalam konteks pendidikan IPS* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Winataputra, U.S. (2005). *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*: Tinjauan Psiko-Pedagogis dan Sosioandragogis, Jakarta: Dijen Pendidikan Tinggi (Bahan SUSCADOS Dikwar).

Winataputra, U.S. (2006). *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah: Tinjauan Psiko-Pedagogis*. Jakarta: Panitia Semiloka Pembudayaan Nilai Pancasila, Dit. Dikdas, Ditjen Mandikdasmen (Makalah).